

# Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) Di Indonesia (2015-2017)

**Masfiatun**

Concern Strategic Think Thank  
E-mail: masfiatun.04@gmail.com

## **Abstract**

*This study is motivated by the number of crimes in Indonesia in 2015-2017 that are fluktuative. Efforts and policies to prevent and reduce crime have been carried out by state in this case the security apparatus (Polri), but the implication is that not all regions can reduce the number of crimes. Therefore this study tries to examine whether economic factors influence the number of crimes. The model used in this study is a random effect model with a period of research from 2015 to 2017. The results of the study indicate economic inequality has a positive effect significant on the number of crimes, while the variables of economic growth, poverty and unemployment do not affect significant to the number of crimes.*

**Keywords:** *Economic Factor, Total Crime, Random Effect Model*

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah kejahatan di Indonesia pada tahun 2015-2017 yang bersifat fluktuatif. Upaya kebijakan untuk mencegah dan mengurangi tindak kejahatan telah dilakukan oleh negara dalam hal ini aparat keamanan (Polri), namun implikasinya tidak semua wilayah terjadi penurunan jumlah kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengurai apakah faktor ekonomi memengaruhi jumlah kejahatan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model dengan periode penelitian tahun 2015 sampai 2017. Hasil peneitian menunjukkan ketimpangan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah kejahatan. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran tidak berdampak signifikan pada jumlah kejahatan.*

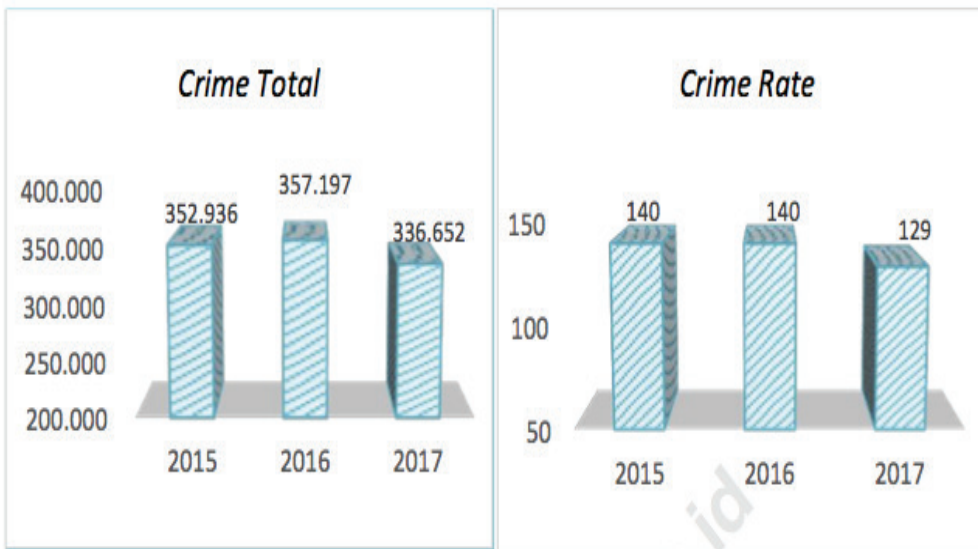
**Kata Kunci:** *Faktor Ekonomi, Jumlah Kejahatan, Random Effect Model*

## **Pendahuluan**

Menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan salah satu langkah strategis yang memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Hal ini telah tertuang dalam program presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla (2014-2019) dalam Nawa Cita poin pertama (1) “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang tepercaya dan pembangunan

*pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim*". Dengan demikian secara tidak langsung "keamanan" akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Apabila keadaan aman dan kondusif, pelaku ekonomi seperti pengusaha, investor dan lainnya dapat beraktivitas dengan percaya diri. Sebaliknya jika keamanan suatu negara terganggu maka tidak ada kepercayaan pelaku pasar untuk bertransaksi maupun menanamkan modal. Berbagai upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu (1) mengurangi pengulangan kejahatan, dan (2) mencegah terjadinya kejahatan (*the first crime*) atau lebih dikenal dengan metode preventif (*prevention*).

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Pada tahun 2015–2017, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah kejahatan meningkat sebesar 1.2%, kemudian tahun 2017 turun menjadi 5.75% seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.1.

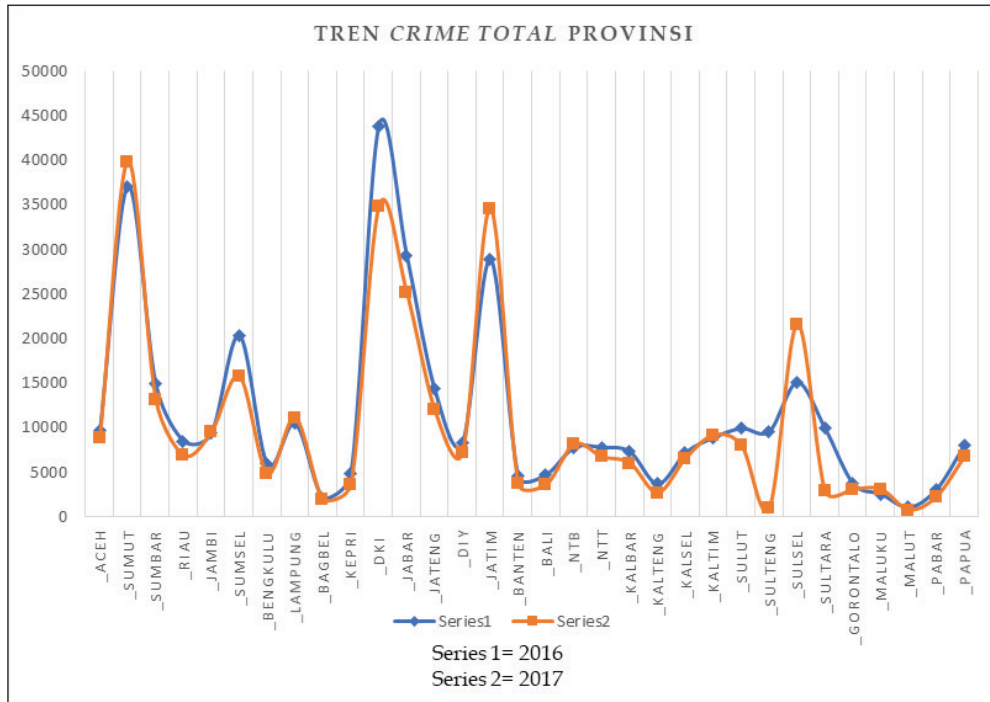


Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Tingkat Risiko Terkena Kejahatan (*Crime Rate*) di Tingkat Nasional Tahun 2015 - 2017. Sumber: BPS, Statistik Kriminal 2018

Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) sejalan dengan jumlah orang yang terkena tindak kejahatan (*crime rate*). Pada tahun 2017 *crime total* turun maka setiap 100.000 penduduk juga mengalami penurunan terkena tindak kejahatan. *Crime rate* merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu. Pada tahun 2015 dan 2016 angka *crime rate* stagnan diangka 140, yang menunjukkan setiap 100.000 penduduk yang terkena tindak kejahatan sebesar 140 orang, kemudian turun menjadi 129. Selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) 00.01'29'' (1 menit 29 detik) pada tahun 2015 dan menjadi sebesar 00.01'28'' (1 menit 28 detik) pada tahun 2016. Kemudian intervalnya menjadi semakin panjang pada tahun 2017 menjadi sebesar 00.01'33'' (1 menit 33 detik). Interval waktu yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun dan sebaliknya.<sup>1</sup>

Pada level provinsi, penurunan yang signifikan terjadi di provinsi DKI Jakarta seperti yang terlihat pada Gambar 1.2.

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal. 2018.



Gambar 1.2 Tren *Crime Total* Provinsi

Sumber: BPS, data diolah<sup>2</sup>

Dari Gambar 1.2 terlihat terdapat *range* yang cukup lebar jumlah kejahatan antar provinsi. Misalnya, Sumatera Selatan dan DKI Jakarta jumlah kejahatan mencapai angka lebih dari 30.000, disisi lain Maluku Utara hanya sebesar 789. Kontribusi terbesar jumlah kejahatan ada di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Ketika provinsi-provinsi tersebut mengalami penurunan kejahatan yang cukup signifikan maka akan membawa pengaruh yang cukup besar di tingkat nasional.

Penyebab kejahatan telah dipelajari secara luas oleh disiplin ilmu sosial, dengan menggunakan determinan faktor ekonomi dan memperoleh relevansi yang lebih besar selama dekade terakhir. Meskipun analisis pengaruh pendapatan terhadap kenakalan bukanlah hal baru di lapangan. Aliran literatur modern ini dipelopori oleh Becker.<sup>3</sup> Dia menyajikan pilihan kriminal, yang dimaksudkan sebagai pemicu utama "*supply of offences*," sebagai masalah standar ekonomi mikro dari *utilitas* yang diharapkan. Individu memilih

<sup>2</sup> Statistik Kriminal 2016 dan 2017

<sup>3</sup> Gary S. Becker, "Crime and Punishment: An Economic Approach," *Journal of Political Economy*, Vol. 76, No. 2, (Mar. - Apr, 1968), 169-217

apakah akan melakukan kejahatan dengan membandingkan manfaat yang diharapkan dengan biaya, yang juga dapat mencakup hilangnya opsi luar, biasanya diwakili oleh pendapatan dari aktivitas legal, dan kurang berisiko. Dia juga memperkenalkan tema hukuman kejahatan yang memasuki masalah baik dalam bentuk kemungkinan ditangkap dan besarnya hukuman. Ehrlich memperbaiki dan memperluas model, dan memberikan putaran yang lebih besar pada diskusi tentang respons individu terhadap insentif ekonomi dan interaksi mereka.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, banyak faktor lain selain pendapatan individu dapat dimasukkan dalam analisis penentu kejahatan, karena mereka memodifikasi peluang orang dalam kegiatan hukum. Dalam analisisnya, memasukkan enam faktor utama yang dianalisis dalam studi sebelumnya yang cenderung berkorelasi dengan faktor-faktor lain yang dihilangkan, seperti tingkat upah, tingkat pekerja, dan anggaran bagi aparat keamanan.<sup>5</sup>

Munculnya pendekatan ekonomi untuk menganalisis perilaku kejahatan didasari asumsi bahwa individu melakukan kejahatan secara rasional. Seseorang ketika melakukan tindak kejahatan akan memikirkan benefit yang didapatkan dan risiko maupun hukuman yang diterima.<sup>6</sup> Becker adalah peneliti pertama yang memasukkan faktor ekonomi ke dalam model kejahatan. Dia melihat untuk menekan angka kriminal tidak cukup dengan pendekatan *punishment*, sebab tidak kriminal berhubungan dengan aktivitas-aktivitas ekonomi dimana pelaku kriminal memperhitungkan *benefit* dan *cost*. Dengan demikian sangat relevan jika model ekonomi dimasukkan ke dalam analisis perilaku tindak kriminal. Jenis kejahatan yang banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi adalah kejahatan properti, seperti penipuan, pencurian dan perampokan.

Ada berbagai faktor yang memengaruhi jumlah tindak kejahatan, baik dari sudut pandang sosial, ekonomi dan psikologi. Penelitian ini hanya memfokuskan dari disiplin ekonomi. Abadinsky *et al*, menemukan perubahan tingkat ketimpangan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kejahatan.<sup>7</sup> Hal yang berbeda ditemukan oleh Neumeyer, ketimpangan bukanlah penentu yang signifikan secara statistik, kecuali pada sejumlah kecil di suatu negara. Alasan mengapa

<sup>4</sup> Dutta, Mousumi and Zakir Husain, "Determinant of Crime Rate: Crime Deterrence and Growth in Post-Liberated India," *MPRA Paper*, No 14478. (2009)

<sup>5</sup> Giovanni Cerulli, Maria Ventura, and Christopher F Baum. "The Economic Determinants of Crime: An Approach through Responsiveness Scores," Boston College Working Papers in Economics 948, Boston College Department of Economics. (2018), 3-4.

<sup>6</sup> Erling Eide, Paul H. Rubin and Joanna M. Shepherd, "Economics of Crime," *Foundations and Trends in Microeconomics*, Vol. 2, No 3, (2006), 205-279.

<sup>7</sup> Hector Gutierrez Rufraños, Madeleine Power, Kate E Pickett, Richard Wilkinson, "Income Inequality and Crime: A Review and Explanation of The Time series Evidence," *Sociologi and Criminologi*, 1 : 1 (2013).

hubungan antara ketimpangan dan kejahatan *spurious* dikarenakan ketimpangan pendapatan cenderung berkorelasi dengan efek tetap khusus negara seperti perbedaan budaya.<sup>8</sup> Khan *et al* , menemukan faktor ekonomi yang memengaruhi peningkatan angka kriminalitas meliputi; pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Hasil temuannya menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan angka kriminalitas dalam jangka pendek dan negatif dalam jangka panjang, sedangkan kemiskinan dan pengangguran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan angka kriminalitas.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan umum yang telah dipaparkan di atas, pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah mencari faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi jumlah kejahatan di Indonesia, sedangkan faktor-faktor non ekonomi dianggap *konstan*.

## Tinjauan Literatur

### Ketimpangan dan Kriminalitas

Beberapa ekonom telah lama berpendapat bahwa ketidaksetaraan pendapatan cenderung menjadi penyebab kejahatan kekerasan, khususnya kejahatan properti. Hal ini dikarenakan ketidaksetaraan yang lebih besar berarti konsentrasi kekayaan ekonomi yang lebih tinggi di tangan segelintir orang, yang menyiratkan target yang lebih mudah bagi para penjahat potensial dan meningkatkan keuntungan bersih dari kejahatan kekerasan properti.<sup>10</sup> Dari sudut pandang yang berbeda, yang populer di kalangan banyak kriminolog dan sosiolog, juga menganggap ketidaksetaraan ekonomi sebagai sumber utama kejahatan kekerasan. Kekurangan relatif dari orang miskin cenderung menyebabkan frustrasi dan kemarahan yang menjerumuskan dirinya dalam kejahatan kekerasan.

Pandangan berbeda membuktikan hipotesis hubungan ketimpangan dan tidak kekerasan bersifat lemah. Bukti dari analisis *time series* tentang tingkat kejahatan *agregat* di AS tidak meyakinkan. Regresi *cross-sectional* di seluruh wilayah metropolitan atau negara bagian di

---

<sup>8</sup> Eric Neumayer, "Is Inequality Really Major Cause of Violent Crime? Evidence from Cross-National Panel of Robbery and Violent Theft Rate," *Journal of Peace Research*, Vol. 42, No. 1, (2005), 101-112.

<sup>9</sup> Nabeela Khan, Junaid Ahmad, Muhammad Nawaz, Khalid Zaman, "The Socio-Economic Determinant of Crime in Pakistan: New Evidence on an Old Debate," *Arab Economics and Business Journal*, Volume 10, Issue 2, (October 2015), 73-81.

<sup>10</sup> A.H. Baharom dan Muzafar Shah Habibullah, "Crime and Inequality: The Case of Malaysia," *Journal of Politics and Law*, Vol. 2, No.1, (2009), 55-70.

AS serta kadang-kadang di beberapa negara tidak selalu menunjukkan efek positif.<sup>11</sup> Mengacu hasil studi Freeman tahun 1996 yang tidak dipublikasikan, di mana hubungan antara ketimpangan dan kejahatan menghilang begitu efek-efek tetap dikontrol. Ini tidak mengherankan, sebagaimana dikemukakan Bourguignon, faktor-faktor yang tidak teramati cenderung secara simultan memengaruhi ketimpangan pendapatan dan kejahatan. Mengingat variasi yang sangat besar dalam hal yang memengaruhi tingkat kejahatan di luar, karakteristik ketimpangan pendapatan dapat menjelaskan sedikit penyebab kejahatan. Seperti yang dikemukakan Glaeser *et al*, ketidaksetaraan pendapatan mungkin hanya mewakili efek dari faktor-faktor yang tidak dapat diamati seperti budaya.<sup>12</sup>

Chiu dan Madden mempresentasikan model teoretis yang mencari hubungan potensial antara memburuknya ketimpangan pendapatan dan peningkatan jumlah pencurian, dan hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan ketidaksetaraan relatif meningkatkan tingkat kejahatan.<sup>13</sup> Wilson dan Daly, memandang kejahatan sebagai akibat dari persaingan status. Mereka berpendapat bahwa orang-orang di bagian bawah distribusi pendapatan sangat sensitif terhadap ketidaksetaraan dan ini mengarah pada perilaku pencarian risiko (seperti kejahatan).<sup>14</sup> *Theory of relative deprivation* Runciman, menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendapatan meningkatkan perasaan dirampas dan tidak adil, yang menyebabkan individu yang lebih miskin mengurangi persepsi ketidakadilan ekonomi melalui kejahatan. Fajnzylber *et al*, menemukan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan dapat meningkatkan tingkat kejahatan (kejahatan dengan kekerasan), dalam studi mereka di beberapa negara maju dan berkembang untuk periode 1970-1994.<sup>15</sup> Hasil yang sama juga diperoleh untuk kasus di Meksiko, sebuah studi oleh Lorenzo dan Sandra pada tahun 2008 menemukan bahwa ketidaksetaraan upah memiliki dampak penting pada kejahatan. Fajnzylber *et al*, secara empiris memeriksa kausalitas antara kejahatan dan ketimpangan pendapatan di 39 negara selama periode 1965-1995. Hasil studinya menemukan korelasi antara indeks gini, dengan tingkat perampokan dan pembunuhan di negara-negara tersebut. Kesimpulannya menunjukkan bahwa ada hubungan positif

<sup>11</sup> Eric Neumayer, "Is Inequality Really Major Cause of Violent Crime? Evidence from Cross-National Panel of Robbery and Violent Theft Rate,"<sup>5</sup>

<sup>12</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>13</sup> W. Henry Chiu and Paul Madden, "Burglary and income inequality," *Journal of Public Economics*, Vol. 69, No. 1, (1998), 123-141.

<sup>14</sup> Margo Wilson and Martin Daly, "Life Expectancy, Economic Inequality, Homicide, and Reproductive Timing in Chicago Neighbourhoods," *BMJ: British Medical Journal*, Vol. 314, No. 7089, (Apr. 26, 1997), 1271-1274

<sup>15</sup> Fajnzylber, Pablo, Daniel Lederman & Norman Loayza, *Determinants of Crime Rates in Latin America and the World - An Empirical Assessment*, (Washington, DC: World Bank, 1998)

antara tingkat kejahatan dan ketimpangan pendapatan antara negara maupun di dalam negara.

### **Pertumbuhan Ekonomi dan Kriminalitas**

Semakin banyak penghasilan berarti ada peluang manfaat yang lebih besar bagi para pelaku kriminal (penjahat) seperti tindak pencurian dan perampokan. Ini juga berarti bahwa daerah yang lebih kaya lebih menarik bagi pelaku kriminal. Peningkatan pendapatan memberikan lebih banyak peluang bagi tindak pidana karena besarnya jumlah barang curian, yang dikenal sebagai efek peluang.<sup>16</sup> Pendapatan per kapita memengaruhi kejahatan secara positif dan dikenal sebagai efek aktivitas rutin. Hasil studi Beki *et al*, menunjukkan semakin banyak pendapatan yang dihabiskan, maka semakin sedikit waktu di rumah dan meningkatkan kegiatan di luar ruangan yang kemungkinan meningkatkan keterlibatan dengan kegiatan kriminal. Namun berdasarkan temuan Khan *et al*, hubungan positif tersebut hanya berlaku dalam jangka pendek, dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tindak kriminal atau bersifat negatif.<sup>17</sup>

Roman melakukan penelitian pada tahun 2013, menguji hubungan antara PDB dan tingkat kejahatan kekerasan dan properti dari tahun 1960 hingga 2013. Dia memulai dengan menguraikan kesulitan dalam menguji hipotesis bahwa faktor-faktor ekonomi makro dapat menjelaskan tren kejahatan. Kejahatan jelas memengaruhi faktor-faktor ekonomi makro serta dipengaruhi oleh mereka, sehingga menyebabkan hubungan yang saling tergantung di antara keduanya. Dia melihat dua hipotesis yang sama dengan Ekonom. *Pertama*, Kriminolog percaya bahwa masa ekonomi yang sulit membuat orang lebih bersedia untuk melakukan kejahatan dan *kedua*, Ekonom percaya bahwa waktu ekonomi yang lebih baik meningkatkan kejahatan. Dengan memeriksa hubungan antara PDB dan kejahatan yang digambarkan dalam sebuah grafik sederhana tidak dapat menyimpulkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kejahatan.

---

<sup>16</sup> Steven D. Levitt, "The Changing Relationship between Income and Crime Victimization," *Economic Policy Review*, Vol. 5, No. 3, (September 1999), 87-98.

<sup>17</sup> Lihat selanjutnya, Nabeela Khan, Junaid Ahmad, Muhammad Nawaz, Khalid Zaman, "The Socio-Economic Determinant of Crime in Pakistan: New Evidence on an Old Debate," artikel ini meneliti hubungan ketimpangan pendapatan dengan menggunakan data *time series*, sehingga perlu melihat hubungan jangka pendek dan jangka panjang hubungan variabel tersebut.



## Kemiskinan dan Kriminalitas

Patterson menemukan tingkat kemiskinan absolut, diukur dengan persentase rumah tangga dengan pendapatan tahunan di bawah \$ 5.000, secara signifikan terkait dengan tingkat kejahatan kekerasan serius yang lebih tinggi.<sup>18</sup> Pengukuran yang digunakan di Indonesia, penduduk dikatakan miskin apabila dia berada dibawah garis kemiskinan yang sudah ditetapkan BPS. Kemiskinan dapat menyebabkan tingkat stres dan penyakit mental yang tinggi yang pada akhirnya menyebabkan individu untuk mengadopsi perilaku kriminal. Ini juga menyebabkan orang miskin merasa lebih layak untuk melakukan kejahatan.<sup>19</sup> Sampson dan Laub meneliti para penjahat miskin di Boston, menemukan bahwa pengaruh kemiskinan pada pelanggaran yang terus-menerus hanya penyebab tidak langsung dari kriminalitas.

“Pengaruh terkuat dan paling konsisten pada kenakalan formal dan tidak formal dari kondisi sosial keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Rendahnya pengawasan orang tua, disiplin yang tidak menentu, mengancam, dan keras, dan ikatan orang tua yang lemah terkait kuat dan langsung dengan kenakalan. Keterikatan sekolah memiliki efek negatif yang besar pada kenakalan yang tidak bergantung pada proses keluarga. Kami menemukan bahwa faktor latar belakang struktural memiliki sedikit pengaruh langsung pada kenakalan, tetapi sebaliknya dimediasi sumber-sumber sosial, informal juga ikut andil. Ketika ikatan yang menghubungkan pemuda dengan masyarakat, baik melalui keluarga atau sekolah melemah, kemungkinan kenakalan meningkat. Kondisi struktural negatif (seperti kemiskinan atau gangguan keluarga) juga memengaruhi kenakalan, tetapi sebagian besar melalui variabel proses keluarga dan sekolah”.<sup>20</sup>

Meskipun kuat, pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan dipicu oleh peristiwa dan pengalaman dengan intensitas dan durasi yang tidak mudah ditangkap oleh kondisi umum. Kondisi orang tua pengangguran dan penghasilan yang minim, penting bagi

<sup>18</sup> E. Britt Patterson, “Poverty, Income Inequality, and Community Crime Rates,” *Criminology*, 29 (4), (November 1994), 755-776.

<sup>19</sup> Nabeela Khan, Junaid Ahmad, Muhammad Nawaz, Khalid Zaman, “The Socio-Economic Determinant of Crime in Pakistan: New Evidence on an Old Debate,” 75.

<sup>20</sup> Colin Webster and Sarah Kingston, “Poverty and Crime Review,” *Center for Applied Social research (CeASR)*, Leed Metropolitan University, (Mei 2014), 9.

perkembangan anak menuju remaja. Kemiskinan berdampak pada kejahatan melalui beragam rantai dan jalur sebab akibat, yang semuanya mungkin memiliki pengaruh individu secara lemah, tetapi bersama-sama dikaitkan dengan pengalaman hidup dalam kemiskinan. Ada kombinasi dalam kondisi kemiskinan memungkinkan seseorang akan melakukan kejahatan, ditangkap dan menjadi korban kejahatan.

Dampak kemiskinan pada kejahatan melibatkan hubungan timbal balik yang kompleks antara variabel mediasi tingkat individu dan masyarakat, dan bukti kuat dari hubungan ini sulit didapat. Ada beberapa alasan untuk keadaan ini, semua berkaitan dengan hubungan sebab akibat bersama antara kemiskinan dan kejahatan. Apakah hubungan antara kemiskinan dan kejahatan itu langsung atau tidak langsung. studi terbesar dan jangka panjang, yang mencari tahu apakah individu dari lingkungan yang secara sosial kurang beruntung memiliki kecenderungan lebih besar untuk terlibat dalam kejahatan. Sebagai contoh, sebuah penelitian terhadap 1.265 anak yang lahir di Christchurch, Selandia Baru, pada tahun 1977 dari lahir hingga usia 21 tahun menemukan hubungan yang jelas antara kemiskinan dan kejahatan, tetapi ini mencerminkan proses kehidupan di mana keluarga, individu, sekolah, dan faktor sebaya bergabung untuk meningkatkan kerentanan individu terhadap kejahatan.<sup>21</sup>

Beberapa peneliti dan penulis secara khusus menekankan kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi korban kejahatan dari pada aspek paling signifikan dari dampak kemiskinan terhadap kejahatan. Individu yang lebih miskin juga lebih sering menjadi korban kejahatan, dan bukti internasional menunjukkan bahwa mereka yang tinggal di lingkungan miskin jauh lebih mungkin menjadi korban kejahatan. Di Kanada, Walter menemukan bahwa tingkat kejahatan lebih tinggi dan penduduk lebih cenderung menjadi korban kejahatan di perumahan umum daripada di daerah kelas menengah atau atas. Demikian pula, di AS, penelitian Levitt atas Survei Korban Kejahatan Nasional mengungkapkan bahwa viktimisasi kejahatan semakin terkonsentrasi di lingkungan miskin. Levitt mengklaim bahwa rumah tangga miskin 60 % lebih mungkin untuk dibobol daripada rumah tangga kaya. Kurangnya sumber daya dan akses ke alat pencegahan kejahatan dapat berarti bahwa orang miskin menjadi sasaran para penjahat yang tahu bahwa mereka lebih rentan dan tidak diamankan secara memadai.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> David Fergusson, Nicola Swain-Campbell and John Horwood, "How does childhood economic disadvantage lead to crime?," *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, Volume. 45, Issue.5, (Juli 2005), 956-66.

<sup>22</sup> Colin Webster and Sarah Kingston, "Poverty and Crime Review," 9.

Pandangan yang berlawanan oleh Bailey, yang gagal menemukan hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat pembunuhan. Bailey berargumen faktor-faktor selain kemiskinan lebih signifikan seperti etnisitas, kelas sosial atau faktor non-ekonomi.<sup>23</sup> Hasil penelitian Hooghe *et al* di tahun 2011 tidak menemukan hubungan yang signifikan antara faktor ekonomi (ketimpangan pendapatan) dan kejahatan kekerasan di Belgia, tetapi mereka menemukan hubungan antara pengangguran dan kejahatan kekerasan dan properti. Studi Hipp and Yates dari 25 kota AS menunjukkan bahwa dampak kemiskinan terhadap hubungan kejahatan tidak selalu langsung atau kejahatan mengikuti kemiskinan.<sup>24</sup>

### Pengangguran dan Kriminalitas

Teori perilaku kriminal terutama didasarkan pada asumsi perilaku rasional, yang pertama kali dikemukakan oleh Bentham pada tahun 1789. Bentham menulis; "... keuntungan kejahatan adalah kekuatan yang mendorong manusia untuk melakukan kenakalan: rasa sakit hukuman adalah kekuatan yang digunakan untuk menahannya. Jika yang pertama dari kekuatan-kekuatan ini menjadi lebih besar, kejahatan akan dilakukan; jika yang kedua, kejahatan tidak akan dilakukan".

Becker, menggunakan asumsi biasa bahwa pelaku kejahatan potensial seolah-olah dia memaksimalkan utilitas yang diharapkan, dan utilitasnya adalah fungsi positif pendapatan:

$$E(U) = p*U(Y-f) + (1-p)*U(Y) \quad (1)$$

Di mana  $E$  menunjukkan harapan,  $U$  adalah utilitas,  $p$  adalah probabilitas subyektif ditangkap dan dihukum,  $Y$  adalah pendapatan moneter ditambah psikis dari pelanggaran, dan  $f$  adalah ekuivalen moneter dari hukuman. Ini bisa berupa denda atau biaya peluang pergi ke penjara, yaitu upah individu. Individu akan melakukan kejahatan jika  $E(U) > 0$ , jika tidak, ia tidak akan melakukannya.

Hal itu dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan  $p$  akan mengurangi utilitas yang diharapkan, dan dengan demikian jumlah pelanggaran lebih dari persentase peningkatan yang sama dalam  $f$ , jika individu tersebut adalah pecinta risiko. Peningkatan  $f$  akan memiliki efek yang lebih besar jika individu tersebut menolak risiko. Secara umum, Becker berusaha menemukan tingkat optimal  $p$  dan

<sup>23</sup> William C. Bailey, "Poverty, Inequality and City Homicide Rates," *Criminology*, Vol. 22, No. 4, (1984), 531-550.

<sup>24</sup> John R. Hipp and Daniel K. Yates, "Ghettos, thresholds, and crime: Does concentrated poverty really have an accelerating increasing effect on crime," *Criminology*, Volume, 49, Issue. 4, (2011), 955-990.

$f$  untuk meminimalkan biaya sosial. Oleh karena itu, ia mencoba untuk menemukan tingkat kejahatan yang optimal mengingat bahwa peningkatan  $p$  atau  $f$  melalui kebijakan publik yang berbeda memerlukan biaya. Ini menyiratkan bahwa jumlah kejahatan nol belum tentu efisien. Singkatnya, teori-teori awal terutama berfokus pada peran tingkat keparahan dan kemungkinan hukuman.<sup>25</sup>

Beberapa penelitian terbaru seperti hasil studi Mustard menunjukkan hubungan yang jauh lebih kuat.<sup>26</sup> *Pertama*, dia berpendapat bahwa model regresi data panel lebih umum digunakan dalam penelitian terbaru dan mereka hampir selalu menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel pasar tenaga kerja dan kejahatan. Studi yang menggunakan data *cross section* dan *repeated cross section* dapat mengontrol lebih sedikit penjelasan alternatif dan menunjukkan hasil yang lebih ambigu. *Kedua*, penggunaan data di tingkat lokal seperti kota, kabupaten, dan sensus, sekarang menjadi standar saat menggunakan data agregat. Ini sejalan dengan apa yang diusulkan oleh Levitt dalam makalah "Strategi Alternatif untuk Mengidentifikasi Hubungan Antara Pengangguran dan Kejahatan" pada tahun 2001. Studi-studi ini jauh lebih mungkin untuk mendokumentasikan hubungan antara pasar tenaga kerja dan kejahatan daripada penelitian yang menggunakan area agregasi yang lebih besar. Karena kejahatan bervariasi dalam hal-hal penting di seluruh wilayah geografis yang bahkan relatif kecil, data tingkat nasional atau negara bagian dapat menyamarkan sebagian besar variasi penting yang diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab. *Ketiga*, Mustard menemukan mengejutkan bahwa studi empiris untuk waktu yang lama hampir hanya berfokus hanya pada tingkat pengangguran dan menghilangkan variabel seperti pendapatan dan pendidikan. Mereka yang telah memasukkan pendapatan dan pengangguran dalam studi mereka umumnya menemukan bahwa hubungan antara pendapatan dan kejahatan lebih kuat daripada pengangguran dan kejahatan. Namun, pengangguran pada umumnya masih berpengaruh.<sup>27</sup>

Khan *et al* dari hasil empirisnya menunjukkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang mendukung adanya hubungan yang signifikan dan positif antara pengangguran dan tingkat kejahatan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menurunkan peluang penghasilan bagi individu-individu yang pada gilirannya memaksa

---

<sup>25</sup> Daniel Almén, *Unemployment and Crime-Exploring the Link in Time of Crises*. Bsc Thesis in Economic. Lund University, (2011), 7.

<sup>26</sup> David B. Mustard, "How Do Labor Markets Affect Crime? New Evidence on an Old Puzzle," *IZA Discussion Paper*, No. 4856, (2010).

<sup>27</sup> Daniel Almén, *Unemployment and Crime-Exploring the Link in Time of Crises*, 10.

mereka untuk melakukan kejahatan. Britt menjabarkan teori yang telah dikembangkan dari sudut pandang sosiologis.<sup>28</sup> Dua teori yang ia fokuskan sangat penting dalam menjelaskan hubungan antara kejahatan dan pengangguran, yakni perspektif motivasi dan perspektif peluang. *Pertama*, perspektif motivasi adalah teori intuitif yang diharapkan para ekonom ada dalam hubungan antara pengangguran dan kejahatan. Premisnya adalah bahwa ada hubungan positif antara tingkat kejahatan dan tingkat pengangguran. Dia menjelaskan, ketika kondisi ekonomi memburuk, orang termotivasi untuk melakukan kejahatan sebagai sumber pendapatan. *Kedua*, perspektif peluang, yang melihat kejahatan sebagai *supply* calon pelaku dan korban yang cocok. Selama periode ekonomi yang sulit, orang dan tempat menjadi korban yang kurang cocok karena mereka sendiri tidak memiliki uang atau bahan berlebih barang dan juga lebih menjaga harta benda.

Cantor dan Land mengemukakan bahwa ada pengaruh motivasi antara perubahan dalam pengangguran dan tingkat kejahatan.<sup>29</sup> Secara teori itu ada karena semakin banyak orang menjadi pengangguran, mereka tidak terbiasa dengan mengatasi ketidaknyamanan ekonomi. Juga, ketika orang menjadi pengangguran dalam waktu yang lama mereka menganggap biaya kesempatan untuk memilih pekerjaan resmi sebagai nol karena dia tidak mengorbankan kesempatan kerja yang resmi. Untuk kedua individu ini, imbalan dari kejahatan itu tidak harus setinggi seperti bagi individu yang akan menganggap biaya peluang menjadi positif. Britt juga menyarankan faktor psikologis yang berhubungan dengan menjadi pengangguran untuk waktu yang lama dan kecenderungan individu terhadap perilaku kriminal. Hipotesis kedua Brit adalah bahwa efek motivasi mendominasi efek peluang dan ada hubungan positif antara perubahan tingkat pengangguran dan tingkat pencurian kendaraan bermotor.<sup>30</sup>

## Data dan Metodologi

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dan merupakan data sekunder yang didapat dari publikasi BPS. Variabel jumlah kejahatan yang digunakan bersifat umum atau tidak

<sup>28</sup> Chester L. Britt, "Crime and Unemployment Among Youths in the United States, 1958-1990," *American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 53, No. 1, (Jan., 1994), 99-109.

<sup>29</sup> David Cantor and Kenneth C. Land, "Unemployment and Crime Rates in the Post-World War II United States: A Theoretical and Empirical Analysis," *American Sociological Review*, Vol. 50, No. 3, (Jun., 1985), 317-332.

<sup>30</sup> Matthew D. Melick, "The Relationship between Crime and Unemployment," *The Park Place Economist*, Volume. 11, Issue. 1, (2003), 32.

terspesifikaksi jenis kejahatannya. Variabel ketimpangan pendapatan yang digunakan adalah indeks gini, untuk variabel pertumbuhan ekonomi yang digunakan pertumbuhan produk domestik bruto atas harga konstan tahun 2000. Selanjutnya variabel kemiskinan dan pengangguran menggunakan presentase dari jumlah penduduk yang dikategorikan miskin dan menganggur.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah provinsi. Provinsi yang dianalisis sebanyak 32 provinsi, provinsi yang mengalami pemekaran wilayah seperti Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat tidak menjadi obyek dalam penelitian ini karena ketidaksediaan data kriminal. Model yang digunakan untuk menganalisis data adalah *random effect model*, dengan observasi 32 provinsi dari tahun 2015-2017.

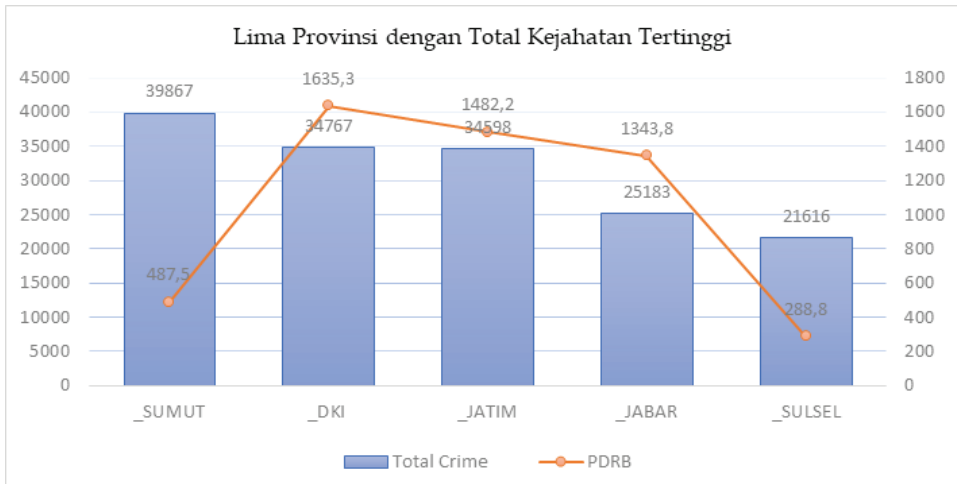
$$y_{it} = \alpha_0 + \beta_1 \text{indeks gini}_{it} + \beta_2 \text{growth}_{it} + \beta_3 \text{poverty}_{it} + \beta_4 \text{unemployment}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3.1)$$

Keterangan:

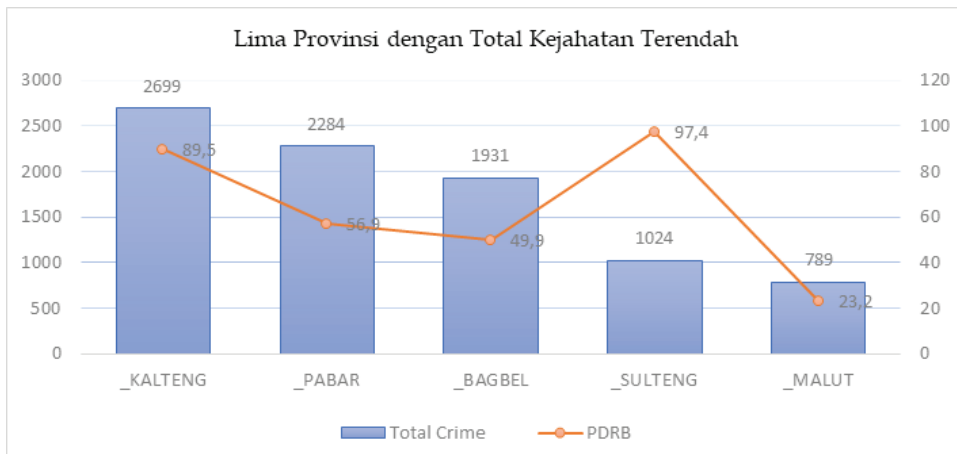
$y_{it}$	= <i>crime total</i> provinsi <i>i</i> pada periode <i>t</i>
$\text{indeks gini}_{it}$	= indeks gini provinsi <i>i</i> pada periode <i>t</i>
$\text{growth}_{it}$	= pertumbuhan ekonomi provinsi <i>i</i> pada periode <i>t</i>
$\text{poverty}_{it}$	= persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan provinsi <i>i</i> pada periode <i>t</i>
$\text{unemployment}_{it}$	= presentase penduduk yang menganggur provinsi <i>i</i> pada periodet

## Pembahasan

Dari 32 provinsi, rata-rata jumlah kejahatan yang cukup tinggi terjadi di provinsi dengan aktivitas ekonomi yang tinggi atau dengan kata lain PDRB provinsi tersebut cukup besar, sedangkan provinsi dengan nilai PDRB relatif rendah jumlah kejahatannya juga relatif lebih rendah. Kondisi tersebut seperti yang tergambar pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2.



Gambar 4. 1  
 Lima Provinsi dengan Total Kejahatan Tertinggi Tahun 2017  
 Sumber: BPS, data diolah.<sup>31</sup>



Gambar 4. 2  
 Lima Provinsi dengan Total Kejahatan Terendah Tahun 2017  
 Sumber: BPS, data diolah.<sup>32</sup>

Dari paparan gambar di atas, menunjukkan provinsi dengan produktivitas yang tinggi yang ditunjukkan dengan nilai PDRB yang tinggi berbanding lurus dengan jumlah kejahatan. Misal, DKI Jakarta

<sup>31</sup> Data diperoleh dari Statistik Kriminal 2017 dan Statistik Sosial dan Ekonomi 2017

<sup>32</sup> Data diperoleh dari Statistik Kriminal 2017 dan Statistik Sosial dan Ekonomi 2017

merupakan provinsi dengan PDRB terbesar yaitu sebesar 1.6 Triliun pada tahun 2017, disusul provinsi Jawa Timur sebesar 1.4 Triliun. Hal ini sejalan dengan jumlah kejahatan yang terjadi di provinsi tersebut. Sebaliknya provinsi dengan jumlah kejahatan terendah memiliki PDRB yang rendah juga. Maluku Utara merupakan provinsi dengan jumlah kejahatan terendah pada tahun 2017, yang juga mempunyai PDRB terendah pada tahun 2017 yakni sebesar 23.2 Milyar. Paparan Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 secara sederhana terlihat pola korelasi antara PDRB dengan jumlah kejahatan. Seperti apa yang ditemukan oleh Beki, semakin tinggi PDRB suatu wilayah maka secara tidak langsung pendapatan per kapita juga meningkat.<sup>33</sup> Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas rutin diluar meningkat dan memungkinkan terlibat dengan tindakan kriminal. Pada penelitian ini, variabel yang digunakan untuk menggambarkan tingkat produktivitas ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Dari gambaran grafik korelasi PDRB dengan jumlah kejahatan masih bersifat dugaan sementara, sehingga perlu diuji secara statistik untuk mengetahui konsistinsi dan siginifikansi kedua varaiabel tersebut. Dengan menggunakan *random effect model* diperoleh hasil estimasi sebagai berikut.

Tabel 4.1  
Hasil Estimasi Regresi Panel *Random Effect*

	y ( <i>Crime Total</i> )	y ( <i>Crime Total</i> )
inequality	31224.46* (17631.13)	29798.3* (17276.96)
growth	39.96613 (112.4419)	
poverty	-188.7762 (250.5338)	
unemployment	-76.63201 (285.6624)	
Constant	2040.041 (7124.512)	

<sup>33</sup> Cem Beki, Kees Zeelenberg and Kees van Montfort, "An Analysis of the Crime Rate in the Netherlands 1950-93," *British Journal of Criminolog*, Vol. 39, No. 3, (Summer 1999), 401-415



R-sq		
within	0.0229	0.0248
between	0.1368	0.0811
overall	0.1287	0.0754
Number of Observation	96	96

Keterangan: \* signifikan 10 persen.

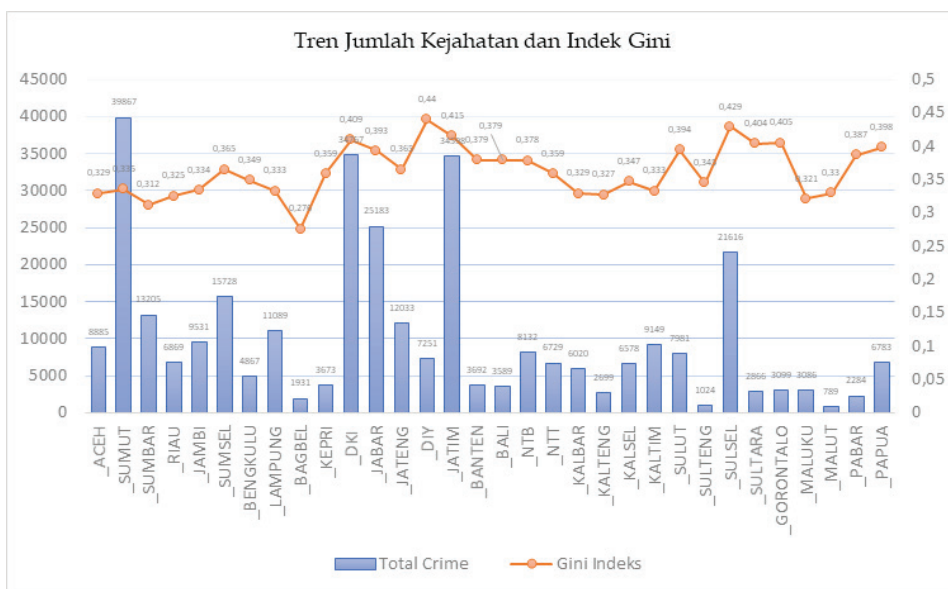
Dari hasil estimasi menunjukkan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah kejahatan, artinya jika indeks gini di suatu provinsi meningkat maka akan meningkatkan jumlah kejahatan, begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fajnzylber *et al*, yang menemukan hubungan antara ketimpangan pendapatan dan berbagai tindak kejahatan seperti perampokan dan pembunuhan bersifat positif. Dari keempat variabel bebas (ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran) hanya variabel ketimpangan pendapatan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah kejahatan.

Hasil temuan ini sejalan dengan Madden dan Chiu yang menemukan memburuknya ketimpangan pendapatan dan peningkatan jumlah kejahatan pencurian. Hal yang serupa juga ditemukan Fajnzylber, Laderman & Loayza secara empiris memeriksa kausalitas antara kejahatan dan ketimpangan pendapatan di 39 negara selama periode 1965-1995, dan menemukan korelasi antara indeks gini dengan tingkat perampokan dan pembunuhan di negara-negara tersebut. Kesimpulannya menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat kejahatan dan ketimpangan pendapatan antara negara maupun di dalam negara. Indeks gini memengaruhi jumlah tindakan kriminal dikarenakan, mereka yang berada di kelas ekonomi bawah (berada di bawah dalam distribusi pendapatan) cenderung sensitif dengan ketimpangan, akibatnya mereka mencari keadilan melalui tindakan yang mengarah pada kegiatan yang berisiko atau tindakan kriminal.<sup>34</sup> Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil temuan Albandinsky *et al*, yang meneliti dampak dari angka ketimpangan di beberapa negara eropa, hasil temuannya menunjukkan ketimpangan pendapatan berkorelasi sangat kuat terhadap tindakan kriminal. Jenis kejahatan yang paling dipengaruhi ketimpangan pendapatan adalah kejahatan properti.

Dari hasil regresi yang menunjukkan adanya pengaruh

<sup>34</sup> .H. Baharom dan Muzafar Shah Habibullah, "Crime and Inequality: The Case of Malaysia,"56.

ketimpangan pendapatan dengan jumlah kejahatan, maka penulis menggambarkan tren indeks gini dengan jumlah kejahatan.



Gambar 4.3 Tren Jumlah Kejahatan dan Indeks Gini di 32 Provinsi Tahun 2017  
 Sumber: BPS, data diolah

Pada Gambar 4.5 terlihat bahwa rata-rata indeks gini yang tinggi diikuti dengan jumlah kejahatan yang tinggi, misalnya saja Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Pola yang sama terjadi ketika indeks gini rendah maka jumlah kejahatan rendah, misalnya di Maluku Utara, Aceh, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Pada penelitian ini, peneliti tidak menguraikan secara rinci pengaruh tingkat ketimpangan terhadap spesifikasi jenis kejahatan. Namun, penulis mencoba mengurai secara sederhana jenis kejahatan apakah yang dominan terjadi di provinsi dengan indeks gini relatif tinggi (DKI Jakarta) dan yang rendah (Maluku Utara).

**Tabel 4.2**  
**Jenis Kejahatan di DKI Jakarta Tahun 2017**

Jenis Kejahatan	Jumlah
Kejahatan terhadap nyawa	76
Kejahatan fisik	1995
Kejahatan terhadap kesusilaan	176
Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	44
Kejahatan hak milik dengan kekerasan	635

Kejahatan hak milik tanpa kekerasan	5624
Narkotika	7214
Penipuan, penggelapan dan korupsi	6169
Lainnya	12834
<b>Total Kejahatan</b>	<b>34767</b>

Sumber: Statistik Kriminal 2018

Dari Tabel 4.2 terlihat kejahatan narkotika mendominasi jumlah kejahatan di DKI Jakarta, disusul dengan kejahatan hak milik (properti) dengan dan tanpa kekerasan. Kondisi ini seperti hasil temuan Fleisher, ketidaksetaraan pendapatan cenderung menjadi penyebab kejahatan properti. Dengan kondisi ekonomi yang timpang maka konsentrasi kekayaan ekonomi yang lebih tinggi di tangan segelintir orang, yang menyiratkan target yang lebih mudah bagi para penjahat potensial untuk melakukan aksi kejahatan. Berbanding terbalik dengan DKI Jakarta, provinsi Maluku Utara memiliki indek gini relatif rendah (0.33) pada tahun 2017. Jenis-jenis kejahatan di Maluku Utara terpapar pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Jenis Kejahatan di Maluku Utara Tahun 2017**

Jenis Kejahatan	Jumlah
Kejahatan terhadap nyawa	7
Kejahatan fisik	184
Kejahatan terhadap kesusilaan	155
Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	14
Kejahatan hak milik dengan kekerasan	16
Kejahatan hak milik tanpa kekerasan	118
Narkotika	63
Penipuan, penggelapan dan korupsi	47
Lainnya	85
<b>Total Kejahatan</b>	<b>689</b>

Sumber: Statistik Kriminal 2018

Dari Tabel 4.3 kondisi yang terjadi di Maluku Utara berbanding terbalik dengan DKI Jakarta, jenis kejahatan yang mendominasi

kejahatan fisik. Kejahatan properti dengan atau tanpa kekerasan jumlahnya relatif rendah. Dengan tingkat ketimpangan yang rendah maka potensi untuk mendapatkan terget (korban) kejahatan di bidang properti rendah.

## Penutup

Jumlah kejahatan yang bersifat fluktuatif di Indonesia pada tiga tahun terakhir (2015-2017) mengindikasikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh aparat keamanan tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Pada tahun 2016 jumlah kejahatan secara nasional meningkat sebesar 1.2%, kontribusi terbesar terhadap peningkatannya disebabkan oleh peningkatan jumlah kejahatan di DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat, yang mana sejalan dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau indeks gini di provinsi-provinsi tersebut. Pola yang sama terjadi pada tahun 2017, ketika jumlah kejahatan secara nasional turun sebesar 5.75%, kontribusi penurunan terbesar ada di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Dari hasil estimasi menggunakan *random effect model*, ketimpangan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah kejahatan.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan keamanan dengan memperkuat aparat keamanan, yakni dengan meningkatkan rasio maupun kualitas aparat keamanan seperti yang tertuang dalam rencana strategis (renstra) Polri 2015-2019. Selain meningkatkan kuantitas dan kualitas aparat keamanan, perlu identifikasi kondisi ekonomi daerah agar upaya *preventif* untuk menekan jumlah kejahatan bisa maksimal. Dari hasil temuan ini ketimpangan pendapatan berdampak pada jumlah kejahatan, sehingga untuk mengurangi jumlah kejahatan baik aparat keamanan (Polri) maupun pemerintah daerah harus ada sinergi kebijakan. Dari aparat keamanan perlu meningkatkan keamanan di provinsi dengan ketimpangan ekonomi (pendapatan) relatif tinggi, guna mempersempit peluang aksi tindak kejahatan. Sedangkan dari sisi pemerintah daerah kebijakan yang diambil haruslah berdampak pada penurunan ketimpangan ekonomi. Kejahatan properti menduduki peringkat tertinggi di provinsi yang cukup timpang khususnya di DKI Jakarta, hal ini sesuai dengan hasil temuan Baharom, A.H. Dengan demikian, selain memperkuat di sektor pertahanan (peningkatan rasio dan kualitas aparat keamanan) pendekatan-pendekatan ekonomi juga perlu diperhitungkan guna mencegah munculnya tindak kejahatan.

## Daftar Pustaka

Almén, Daniel. *Unemployment and Crime-Exploring the Link in Time of Crises*. Bsc Thesis in Economic. Lund University. 2011.

Baharom, A.H. dan Muzafar Shah Habibullah. "Crime and Inequality: The Case of Malaysia,". *Journal of Politic and Law*. Vol. 2. No.1. 2009.

Bailey, William C. "Poverty, Inequality and City Homicide Rates." *Criminology*. Vol. 22, No. 4. 1984.

Becker, Gary S. "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy*. Vol. 76, No. 2. 1968.

Beki, Cem., Kees Zeelenberg and Kees van Montfort. "An Analysis of the Crime Rate in the Netherlands 1950-93." *British Journal of Criminolog*. Vol. 39, No. 3. Summer 1999.

Britt, Chester L. "Crime and Unemployment Among Youths in the United States, 1958-1990." *American Journal of Economics and Sociology*. Vol. 53, No. 1, 1994.

Cantor, David., and Kenneth C. Land . "Unemployment and Crime Rates in the Post-World War II United States: A Theoretical and Empirical Analysis." *American Sociological Review*. Vol. 50, No. 3. Jun., 1985.

Cerulli, Giovanni., Maria Ventura, and Christopher F Baum. "The Economic Determinants of Crime: An Approach through Responsiveness Scores." *Boston College Working Papers in Economics* 948. Boston College Department of Economics. 2018.

Chiu, W. Henry and Paul Madden. "Burglary and income inequality." *Journal of Public Economics*. Vol. 69. No. 1. 1998.

Dutta, Mousumi and Zakir Husain. "Determinant of Crime Rate: Crime Deterrence and Growth in Post-Liberazed India." *MPRA Paper*, No 14478. 2009.

Eide, Erling., Paul H. Rubin and Joanna M. Shepherd. "Economics of Crime" *Foundations and Trends in Microeconomics*. Vol. 2, No. 3. 2006.

Fajnzylber, Pablo, Daniel Lederman & Norman Loayza, *Determinants of Crime Rates in Latin America and the World - An Empirical Assessment*. Washington, DC: World Bank. 1998.

Fergusson, David., Nicola Swain-Campbell and John Horwood. "How does childhood economic disadvantage lead to crime?." *Journal of child Psychology and Psychiatry*. Volume. 45, Issue.5. Juli 2005.

Gutierrez Rufrancos, Hector., Madeleine Power, Kate E Pickett, Richard Wilkinson. "Income Inequality and Crime: A Review and Explanation of The Time series Evidence." *Sociologi and Criminologi*, 1 : 1. 2013.

Hipp, John R. , and Daniel K. Yates. "Ghettos, Thresholds, and Crime: Does concentrated poverty really have an accelerating increasing effect on crime." *Criminology*. Volume, 49, Issue. 4. 2011.

Khan, Nabeela., Junaid Ahmad, Muhammad Nawaz, Khalid Zaman. "The Socio-Economic Determinant of Crime in Pakistan: New Evidence on an Old Debate." *Arab Economics and Bussiness Journal*. Volume 10. Issue 2. 2015.

Levitt, Steven D. "The Changing Relationship between Income and Crime Victimization." *Economic Policy Review*. Vol. 5. No. 3. September 1999.

Melick, Matthew D. "The Relationship between Crime and Unemployment." *The Park Place Economis*, Volume. 11. Issue. 1. 2003.

Mustard, David B. "How Do Labor Markets Affect Crime? New Evidence on an Old Puzzle." *IZA Discussion Paper*. No. 4856. 2010.

Neumayer, Eric. "Is Inequlity Really Major Cause of Violent Crime? Evidence from Cross- National Panel of Robbery and Violent Theft Rate. " *Journal of Peace Research*. Vol. 42, No. 1. 2005.

Patterson, E. Britt. "Poverty, Income Inequality, and Community Crime Rates." *Criminology*. 29 (4). November 1994.

Webster, Colin and Sarah Kingston. "Poverty and Crime Review." Center for Applied Social research (CeASR). Leed Metropolitan University. Mei 2014.

Wilson, Margo and Martin Daly. "Life Expectancy, Economic Inequality, Homicide, and Reproductive Timing in Chicago Neighbourhoods." *BMJ: British Medical Journal*. Vol. 314, No. 7089. 1997.